



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**SKENARIO DAN PIDATO PIMPINAN DPR-RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI PERINGATAN HUT KE-69 DPR/MPR-RI DAN
LAPORAN KINERJA DPR-RI TAHUN SIDANG 2013-2014**

Jumat, 29 Agustus 2014

ACARA:

Pidato Pimpinan DPR-RI Pada Rapat Paripurna DPR-RI
Peringatan HUT DPR/MPR-RI Ke-69 dan
Laporan Kinerja DPR-RI Tahun Sidang 2013-2014.

MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA

PEMBAWA ACARA:

- Menyanyikan Bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- Hadirin dipersilahkan berdiri.

MENGHENINGKAN CIPTA

PEMBAWA ACARA:

"Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua Rapat".

PIMPINAN RAPAT (WAKIL KETUA DPR RI/KORPOLKAM):

Hadirin dan hadirat yang kami hormati,

Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta, seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga arwah para pendahulu kita mendapat tempat yang sempurna di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita semua diberikan kekuatan lahir dan bathin untuk meneruskan perjuangan mengemban amanat rakyat, menuju masyarakat adil, makmur, berdasarkan Pancasila, dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan cita-cita kita bersama.

Mengheningkan Cipta Mulai!

Diperdengarkan Hymne Mengheningkan Cipta
oleh instrumen musik.

Mengheningkan Cipta, selesai.

PEMBAWA ACARA:

"Hadirin dipersilahkan duduk kembali."

PIMPINAN RAPAT (WAKIL KETUA DPR RI/KORPOLKAM):

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat,

- Ketua dan Wakil-Wakil Ketua MPR-RI;
- Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPD-RI;
- Wakil-Wakil Ketua DPR-RI;
- Bapak Ketua DPR-RI Periode
- Bapak Ketua DPR-RI Periode
- Bapak/Ibu Pimpinan Fraksi-fraksi DPR-RI
- Para Anggota DPR-RI;
- Pengurus PADMANAGRI;
- Sekretaris Jenderal MPR, DPR, DPD RI, dan jajarannya,
- Para Undangan yang kami muliakan,
- Hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan catatan dari Sekretariat Jenderal, telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak Anggota Dewan, terdiri dari seluruh unsur fraksi DPR-RI. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib, dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim*,izinkan kami membuka Rapat Paripurna DPR-RI Peringatan HUT DPR/MPR-RI Ke-69 dan Laporan Kinerja DPR-RI Tahun Sidang 2013-2014.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR tentang Tata Tertib, Rapat Paripurna ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

Hadirin dan hadirat, Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Sesuai dengan Jadwal Acara Rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 26 Juni 2014, maka Acara Rapat Paripurna Dewan hari ini merupakan acara tunggal, yaitu: "Pidato Pimpinan DPR RI dalam Rangka Peringatan HUT DPR RI ke-69 dan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2013-2014.

Perlu kami beritahukan bahwa pada Rapat Paripurna HUT DPR/MPR RI kali ini, dihadiri oleh delegasi negara-negara peserta forum *South East Asian Parliamentarians Against Corruption* (SEAPAC), dari Malaysia, Timor Leste, Bangladesh, dan Ghana, yang diselenggarakan oleh DPR RI di Jakarta, 28—29 Agustus 2014. Dimohon untuk berdiri.

Hadirin dan hadirat, Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Izinkan saya menyampaikan pidato HUT DPR/MPR-RI ke-69 di podium sidang.

Hadirin dan hadirat, Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Alhamdulillah, rasa syukur tercurahkan yang tidak terhingga kepada *Allah Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat-Nya hari ini kita dapat menyelenggarakan Sidang Paripurna DPR-RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) DPR/MPR-RI ke-69. Usia yang tentu sangat matang bagi institusi DPR/MPR-RI dalam memberikan pengabdian yang terbaik untuk rakyat dalam mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur. HUT DPR/MPR-RI kali ini tentu sangat bermakna, karena ini merupakan Sidang Paripurna Peringatan HUT DPR/MPR-RI yang terakhir diselenggarakan untuk periode 2009-2014. Insya Allah seluruh anggota DPR-RI 2009-2014 telah mencurahkan pengabdian yang terbaik untuk bangsa ini.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

DPR/MPR-RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mengemban tugas sebagai penyambung lidah rakyat, turut menjadi bagian terpenting di dalam mewarnai Negara ini. Keberadaan DPR/MPR-RI sejatinya menjadi kontrol penyeimbang, *check and balances*, terhadap pemerintah agar kekuasaan tidak dijalankan dengan kekuasaan tanpa batas. Di dalam lintas sejarah, DPR/MPR-RI mengalami pasang surut dan berevolusi positif dan semakin memantapkan diri menjadi lembaga negara yang kokoh dalam mengemban kepentingan dan amanat penderitaan rakyat.

Enam puluh sembilan tahun yang lalu, tepatnya tanggal 29 Agustus 1945, adalah momen yang amat bersejarah, saat Presiden Soekarno melantik anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Inilah momentum bersejarah sebagai tonggak kelahiran lembaga perwakilan rakyat. Inilah cikal bakal praktek demokrasi dalam sistem konstitusi kita. Pada awal kemerdekaan, lembaga perwakilan rakyat menasbihkan dirinya sesuai dengan roh perjuangan dan suasana revolusioner pada saat itu. Pada masa demokrasi parlementer yang ditandai jatuh banggunya kabinet pemerintahan, lembaga perwakilan rakyat tampil lebih berwarna dengan berbagai pertentangan politik yang berlarut-larut, bahkan sempat berujung pada penggantian sistem Negara dan UUD Negara. Pada masa-masa krusial tersebut Lembaga perwakilan rakyat selalu bergerak dinamis dan ikut melukis potret utuh setiap tahapan sejarah bangsa dan sistem demokrasi kita.

Pada penggalan sejarah selanjutnya, meski banyak memanen prestasi utamanya dalam menjaga "harmoni" dan "ketenangan" dalam sistem demokrasi Pancasila, DPR-RI sebagai lembaga perwakilan rakyat pada masa itu menuai banyak kritik dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. DPR dianggap belum sepenuhnya menjalankan misi suci sebagai penjelmaan perwakilan rakyat. DPR belum hadir menjadi perwujudan wakil rakyat yang menjalankan fungsi kontrol atas jalannya pemerintahan negara. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat sering pada posisi inferior vis-à-vis menghadapi kekuasaan pemerintah dan bahkan sering dikritik hanya menjadi tukang stempel setiap kebijakan negara. DPR sebagai lembaga legislatif yang mestinya setara dengan eksekutif, terjerembab menjadi lembaga Negara yang seolah berada di bawah bayang-bayang pemerintah. Meski demikian DPR pada masa itu mengukir banyak prestasi dan dedikasi dalam mengawal pembangunan negeri dan ikut mengantarkan Indonesia sebagai Macan Asia.

Reformasi pada tahun 1998 membawa angin perubahan yang besar dalam berbagai lanskap praktek ketatanegaraan. Pada era ini terjadi amandemen konstitusi (4 kali) yang mengubah secara dramatis sistem politik dan demokrasi, hukum, sosial, ekonomi, dan merambah bidang-bidang lainnya. Kalau pada era sebelumnya kekuasaan negara tersentral di istana Presiden, sekarang bandul kekuasaan dan kewenangan bergeser menjadi lebih berimbang. Konsekwensinya lembaga perwakilan rakyat, sekarang ini, mendapat berbagai tambahan kekuasaan dan kewenangan atas nama konstitusi. DPR memegang kekuasaan membentuk UU bersama dengan Presiden, DPR menetapkan politik anggaran negara (APBN) bersama Presiden, DPR berwenang untuk mengontrol jalannya pemerintahan -- 3 hal diatas merupakan tugas dan kewenangan yang secara tradisional melekat pada DPR. Selain itu Presiden harus berunding dengan DPR untuk memilih dan menentukan anggota lembaga negara lainnya seperti menentukan anggota BPK, KY, MA, MK -- juga dalam menentukan pejabat-pejabat penting/strategis seperti Panglima TNI, Kapolri, Gubernur BI, Dubes, pimpinan KPK, dan lainnya. Presiden juga harus mendapat persetujuan DPR dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Namun, dalam menunjuk menteri dan menyusun kabinetnya, Presiden punya hak prerogatif yang tidak bisa diintervensi oleh DPR atau siapapun dan pihak manapun.

Angin perubahan pada era reformasi ini juga menghasilkan lembaga-lembaga negara yang baru untuk memperkuat struktur kenegaraan dan lanskap demokrasi kita, seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY). Jika DPR-RI merupakan cermin wakil rakyat, maka DPD-RI merupakan cermin perwakilan daerah, yang bersama-sama dengan DPR dan Pemerintah mengemban agenda reformasi sebagaimana amanat amandemen konstitusi. Dengan demikian, dengan lahirnya DPD-RI, adik paling bungsu kami, maka lengkaplah dan sempurnalah sudah penghuni Gedung Parlemen, lambang demokrasi kita, yaitu: MPR RI, DPR RI, DPD RI. Kami berdoa semoga perjuangan DPD RI, adik bungsu kami, dalam cita-citanya menjadi senator-senator andal dengan kewenangan besar atau memadai segera bisa terwujud dalam waktu-waktu mendatang.

Saudara-Saudara, Sidang Paripurna yang terhormat,

Sebagaimana diketahui, DPR-RI periode sekarang ini (2009-2014) adalah DPR hasil Pemilu 2009 dan merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat yang terbentuk untuk periode yang ke-18. DPR Periode saat ini lahir ditengah proses demokrasi yang hebat dan terus berkembang, keterbukaan dan kebebasan berpendapat yang makin nyata, masyarakat bebas menyampaikan kritik apapun termasuk terhadap kinerja DPR. Akses informasi mengenai Lembaga Perwakilan Rakyat demikian luas, tidak ada satu hari pun tanpa pemberitaan mengenai DPR, baik pemberitaan positif maupun negatif.

Sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (10) Peraturan Tata Tertib DPR, melalui Sidang Paripurna ini, sebagai Pimpinan DPR, kami berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja DPR-RI untuk kurun waktu satu tahun, yaitu sejak 16 Agustus 2013 sampai dengan 14 Agustus 2014. Saya akan menyampaikan intisari dari Laporan Kinerja seluruh Alat-alat Kelengkapan DPR-RI yang disusun dalam bentuk *executive summary* sebagai bagian tak terpisahkan dari pidato/laporan selama satu tahun sidang.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, selama Tahun Sidang 2013–2014, DPR bersama Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 22 RUU, dengan rincian: 11 RUU Prioritas Prolegnas, 3 RUU Pembentukan Daerah Otonomi Baru, 5 RUU Perjanjian Internasional, 3 RUU berkaitan dengan anggaran.

RUU Prioritas yang telah diselesaikan yaitu [1] RUU tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, [2] RUU tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, [3] RUU tentang Desa, [4] RUU tentang Aparatur Sipil Negara, [5] RUU tentang Perindustrian, [6] RUU tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, [7] RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi UU, [8] RUU tentang Perdagangan, [9] RUU tentang Keinsinyuran, [10] RUU tentang Kesehatan Jiwa, dan [11] RUU tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya tiga RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu [1] RUU tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat, [2] RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah, [3] RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan. Ketiganya di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sedangkan di bidang perjanjian internasional, yaitu [1] RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, [2] RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, [3] RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir, [4] RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India, dan [5] RUU tentang Pengesahan Persetujuan tentang Kerja Sama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki.

DPR juga telah menyelesaikan pembahasan terhadap [1] RUU tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012, [2] RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2014, [3] RUU tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Pelaksanaan fungsi anggaran merupakan salah satu wewenang DPR-RI sebagaimana amanat Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945. Selama Tahun Sidang 2013-2014, DPR telah melaksanakan pembahasan dan penetapan APBN Tahun Anggaran 2014 dan telah diundangkan dengan UU No. 23 Tahun 2013. Juga sudah diselesaikan dan disetujui UU No. 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014, dan UU No. 22 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012.

Sedangkan RAPBN Tahun Anggaran 2015 memiliki makna khusus, karena merupakan APBN transisi yang hanya memuat *baseline* untuk memberikan "ruang yang luas" bagi pemerintah baru dan DPR-RI baru untuk melakukan berbagai penyesuaian arah bersama sesuai yang diamanahkan UU.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Pelaksanaan fungsi pengawasan atau kontrol umumnya menjadi sesuatu yang paling difavoritkan dan menonjol, karena bersangkutan paut dengan masalah/isu-isu aktual yang sedang berkembang di masyarakat. Pemberitaan tentang ini sudah banyak terberitakan di berbagai media massa, baik rapat paripurna maupun rapat di komisi, badan, pansus, panja, atau tim. Beberapa diantaranya ialah: Tim Pengawas Century yang merupakan kelanjutan dari tahun sidang sebelumnya. Selain itu

terdapat Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. DPR juga membentuk Tim Pengawas terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI). Ada juga Tim Pengawas Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria untuk merespon permasalahan pertanahan dan agraria yang sangat kompleks.

Selain itu, perlu juga saya sampaikan bahwa berbagai Alat Kelengkapan DPR, khususnya Komisi-Komisi, juga membentuk berbagai Panja, di antaranya Panja Pengawasan LPP TVRI di Komisi I; Panja Penyelesaian Konflik dan Sengketa Pertanahan di Komisi II; Panja Pengawasan kasus *Jakarta International School (JIS)* di Komisi III; Panja-Panja Pengawasan seperti Panja Garam, Panja Pupuk Bersubsidi dan Panja Gula di Komisi IV; Panja Komoditas Sawit dan Karet di Komisi VI; Panja Kebijakan Energi Nasional dan Panja Mineral dan Batu Bara di Komisi VII; Panja mengenai Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Komisi VIII; Panja BPJS dibentuk oleh Komisi IX; Panja Hambalang dan Pengembangan Perpustakaan di Komisi X, Panja Kinerja Keuangan BUMN di Komisi XI.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Kinerja DPR juga tercermin dalam keterlibatannya terhadap proses seleksi pejabat publik, dengan mengedepankan kompetensi profesionalisme para calon yang diusulkan, dengan menggelar fit and proper test sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perUUan.

Pertimbangan/persetujuan yang telah diberikan DPR melalui Komisi terkait, selama Tahun Sidang 2013–2014, antara lain penetapan Deputy Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI, Kapolri, Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, Hakim Agung, Hakim Konstitusi Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), serta Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BPK Tahun Anggaran 2013, yang diusulkan oleh BPK dan Pemerintah. Komisi XI DPR juga sedang melakukan pembahasan penggantian Anggota BPK yang memasuki masa pensiun.

Selama Tahun Sidang 2013–2014, DPR telah memberikan pertimbangan/persetujuan terhadap calon Duta Besar negara-negara sahabat untuk Indonesia sebanyak 35 (tigapuluh lima) negara. DPR juga telah memberikan pertimbangan terhadap 23 (duapuluh tiga) calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Jumlah surat pengaduan masyarakat pada tahun sidang ini mengalami peningkatan terutama pada bidang politik dan hukum. Karena tahun 2014 merupakan tahun dilaksanakannya Pemilu, banyak harapan digantungkan kepada DPR melalui aspirasi yang disampaikan terkait pelaksanaan

pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden/wakil presiden, yang dinilai banyak catatan terhadap kinerja penyelenggara Pemilu. Besarnya harapan masyarakat tersebut, menunjukkan bahwa DPR masih menjadi lembaga yang dipercaya dan dianggap tepat sebagai tempat menyampaikan aspirasi dan pengaduan.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

DPR-RI telah terus melakukan upaya untuk meningkatkan kelembagaan dengan turut aktif di dunia internasional dengan melakukan inisiasi berdirinya organisasi parlemen regional dan internasional. Hal ini menjadi ruang DPR-RI untuk menjalin hubungan bilateral dengan parlemen negara lain sebagai bagian dari aktivitas diplomasi parlemen terutama melalui kegiatan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP).

Untuk tingkat regional, aktivitas yang dilakukan antara lain, melalui partisipasi DPR RI pada sidang-sidang tingkat regional seperti *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*, *Asian Parliamentary Assembly (APA)*, *South East Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC)* dan *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)*, baik yang diadakan di berbagai negara maupun yang diselenggarakan oleh DPR-RI. Selain itu aktivitas diplomasi parlemen juga dilakukan melalui partisipasi pada sidang-sidang *Inter-Parliamentary Union (IPU)* dan *UN Parliamentary Hearing* yang diselenggarakan setiap tahun di Markas Besar PBB di New York.

Kerja diplomasi parlemen memberi makna penting, khususnya untuk menjaga dan mengawal kepentingan nasional di dunia internasional, sehingga memiliki peran strategis hubungan internasional antar-negara. Diplomasi parlemen juga ditujukan untuk turut mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia, mulai dari persoalan politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya, hak asasi manusia, lingkungan hidup, hingga persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan lainnya.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Supporting system bagi DPR yang selama ini dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen DPR-RI) telah menunjukkan konsistensi dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya setiap tahun. Oleh karena itu, Dewan mengapresiasi Sekretariat Jenderal yang dalam upaya meningkatkan kualitas dukungan terhadap kinerja DPR-RI.

Khusus Tahun Sidang 2013–2014, Sekretariat Jenderal telah melakukan upaya strategis sehingga mendapatkan penghargaan dan prestasi yang sangat baik, di antaranya: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan dari BPK, dan penghargaan keberhasilan menyusun laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah Tahun Anggaran 2013, dan telah dicapai secara berturut-turut sejak Tahun 2009. Selain

tercermin melalui keberhasilan tersebut, untuk pertama kalinya, Sekretaris Jenderal DPR-RI dipercaya menduduki jabatan penting di Asosiasi Sekretaris Jenderal Parlemen sedunia sejak bulan Maret 2014, bagai *Ordinary Member of Executive Committee ASGP*. Capaian tersebut patut kita apresiasi dan menyampaikan rasa bangga kepada Sekretaris Jenderal DPR-RI.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Akhirnya kami berharap semoga DPR tetap memberikan yang terbaik untuk rakyat dan negara tercinta Indonesia. Sebagai pimpinan DPR, saya menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada jajaran pers, yang berkontribusi membangun kelembagaan DPR dan bersama-sama mengawal demokrasi di Indonesia. Kami juga sampaikan terima kasih kepada jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah memberikan dukungan optimal bagi kelancaran pelaksanaan tugas lembaga kita ini, kami sampaikan terima kasih.

Sejujurnya, masih ada hal yang mengganjal, cita-cita yang belum kesampaian yaitu menjadikan DPR sebagai law center (Pusat Pembuatan UU) dan budgeting center (Pusat Anggaran). Juga membuat panggung demokrasi (DPR sebagai rumah rakyat).

Kepada seluruh anggota DPR-RI, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama selama periode ini. Banyak dinamika yang bersama-sama kita lalui dalam memberikan yang terbaik untuk rakyat, bangsa dan Negara ini. Dirgahayu DPR/MPR-RI-RI ke-69, jaya selalu dan kobarkan terus jiwa pengabdian kepada rakyat.

PEMBAWA ACARA:

"Penyerahan *Executive Summary* Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2013-2014 kepada Pimpinan DPR periode ..., perwakilan Padmanagri, Ketua Fraksi atau yang mewakili, oleh Ketua Rapat".

PIMPINAN RAPAT (WAKIL KETUA DPR RI/KORPOLKAM):

Selanjutnya kami mempersilahkan Saudara Achmad Basarah, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, untuk membacakan doa.

Doa oleh Anggota DPR RI

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Achmad Basarah, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang telah membacakan doa, kiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, mengabulkan doa kita bersama. Amien.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikianlah acara Rapat Paripurna dalam rangka Peringatan HUT MPR/DPR RI ke-69 sekaligus penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2013-2014. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian sehingga Sidang ini dapat berjalan dengan baik. Dengan ini kami menutup Sidang dengan mengucapkan, *Alhamdulillahirrabil'alamin.*

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

KETOK 3 X

Jakarta, 29 Agustus 2014

**WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO